

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam sebuah desa adanya lembaga keuangan merupakan sebuah hal yang penting untuk dapat meningkatkan kemandirian desa yang dimulai dari segi keuangan atau *financial*. Lembaga keuangan di desa memiliki peran penting untuk dapat meningkatkan pembangunan utamanya dalam bidang perekonomian. Kendala yang seringkali dialami oleh masyarakat desa adalah terkait permodalan dimana rata-rata permodalan pedesaan masih relative lemah. Selain itu adanya kendala lain seperti kesulitan jaminan serta akses kedalam lembaga perkreditan yang kemudian membuat banyak masyarakat pedesaan berusaha memperoleh dana melalui rentenir dan sejenisnya yang mana pinjaman dengan bunga yang jauh lebih tinggi dari lembaga keuangan resmi (Sundariningsih, 2017). Peminjaman uang illegal justru dapat muncul akibat dari kebutuhan masyarakat desa akan permodalan sehingga hal tersebut memicu peluang yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang. Kehadiran bisnis peminjaman uang yang illegal dan tingkat bunga yang relatif tinggi di pedesaan merupakan pertanda masih belum terpenuhinya kebutuhan kredit yang amat besar dari masyarakat pedesaan. Pemerintah berusaha memenuhi permintaan akan kredit ini dengan berbagai cara, namun program demi program yang dikembangkan nampaknya selalu menghadapi hambatan yang sama, yaitu belum cocoknya program dengan kebutuhan (Sundariningsih, 2017).

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan seperti menghimpun dan menyalurkan dana. Salah satu lembaga keuangan yang ada di masyarakat adalah LPD. LPD adalah merupakan badan usaha milik desa yang melaksanakan tugas dan kegiatan usahanya di lingkungan desa dan untuk desa adat. LPD merupakan lembaga keuangan tradisional yang dicetuskan dan didirikan oleh Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra yang bersifat otonom yang pendiriannya didasarkan kepada kebijakan lokal, yakni dengan peraturan daerah dan *Awig-Awig* desa setempat yang bertujuan dapat membantu Desa Pakraman dalam menjalankan fungsi sosio-kulturalnya. Lembaga Perkreditan Desa sendiri memiliki karakteristik yang unik yang membedakan LPD dengan lembaga keuangan (Dwi, 2022). Kegiatan utama dari LPD yaitu menerima atau menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito, memberikan pinjaman hanya kepada krama desa, menerima pinjaman dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan sistem jemput sehingga masyarakat tidak perlu ke kantor, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan modal, menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank BPD Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai (Pratama & Musmini, 2020). Kehadiran LPD sangat penting untuk membantu perseorangan atau badan usaha lainnya yang memerlukan dana untuk menunjang kehidupannya atau bisnisnya dan menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Dengan hal inilah dapat membantu meningkatkan perekonomian.

Tujuan pendirian LPD untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa, menciptakan pemerataan dan membuka kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Agar tujuan pendirian LPD terwujud maka diperlukan kinerja yang efektif dan efisien dari pengawas internal dalam pengelolaan operasional LPD berjalan dengan baik dan terhindar dari praktik yang tidak sehat. Dari jumlah keseluruhan LPD di Provinsi Bali yakni mencapai 1.437 LPD hingga tahun 2022, per Agustus tahun 2022 LPD kembali mengalami penurunan kinerja yang mana tercatat sebanyak 158 LPD (11,03%) di Bali justru dinyatakan bangkrut karena sudah tidak beroperasi lagi. Berikut data jumlah LPD yang mengalami kebangkrutan di berbagai Kabupaten di tahun 2021-2022:

Tabel 1.1 Jumlah LPD se-Provinsi Bali

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah LPD	Tidak Beroperasi	%	Jumlah LPD	Tidak Beroperasi	%
1	Denpasar	35	0	0%	35	0	0%
2	Badung	122	4	3,3%	122	4	3,3%
3	Buleleng	169	19	11,2%	169	21	12,4%
4	Jembrana	64	1	1,6%	64	1	1,6%
5	Tabanan	309	42	13,6%	311	41	13,2%
6	Gianyar	270	17	6,3%	270	13	4,8%
7	Bangli	159	6	3,8%	159	5	3,1%
8	Klungkung	119	3	2,5%	119	5	4,2%
9	Karangasem	190	16	8,4%	190	16	8,4%

(Sumber: Data LPLPD Provinsi Bali, 2021-2022)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa yang mengalami kebangkrutan terbanyak selama tahun 2022 yaitu di Kabupaten Tabanan sebesar 13,2% dengan jumlah 40 LPD. Pada posisi kedua terdapat Kabupaten Buleleng sebesar 12,4% atau 21 LPD yang mengalami kebangkrutan. Posisi ketiga terdapat kabupaten Karangasem dengan presentase 8,4% atau sebanyak 16 LPD yang bangkrut. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ketiga kabupaten tersebut memiliki jumlah kebangkrutan LPD terbanyak yang berarti pada ketiga kabupaten tersebut, kinerja LPD pada daerah setempat dikatakan kurang baik.

Terkait hal ini, Kabupaten Tabanan menjadi kabupaten yang memiliki kebangkrutan tertinggi telah dikonfirmasi oleh pihak LPD kabupaten Tabanan melalui Koordinator LPD Kabupaten Tabanan. Adanya jumlah kebangkrutan yang tinggi tentu memicu kekhawatiran, yang dimana LPD merupakan salah satu kunci pembangunan ekonomi pedesaan dan perlu diperhatikan kinerjanya sehingga dapat terhindarkan dari kebangkrutan. Berdasarkan data Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Tabanan menyatakan bahwa hingga saat ini jumlah seluruh LPD di Kabupaten Tabanan sebanyak 311 LPD yang tersebar di setiap kecamatan. Kabupaten Tabanan juga menjadi kabupaten terbanyak yang memiliki LPD di Provinsi Bali.

Beberapa tahun terakhir perkembangan LPD di kabupaten Tabanan stabil, tidak mengalami penurunan maupun kenaikan jumlah LPD yang signifikan. Dari segi kuantitas jumlah LPD di kabupaten Tabanan cukup banyak, namun dari segi kualitas, tidak semua LPD yang terdaftar memiliki kualitas yang baik. Kondisi

kesehatan LPD menjadi tolak ukur kualitas LPD (Krisnawati, 2022), berikut merupakan data tingkat kesehatan LPD Kabupaten Tabanan tahun 2022.

Tabel 1.2 Data Tingkat Kesehatan LPD Kabupaten Tabanan

Kecamatan	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Tidak Lapor
Baturiti	17	11	5	1	8	-
Kediri	8	5	6	2	0	-
Marga	11	5	5	3	5	-
Penebel	25	13	12	4	13	-
Kerambitan	12	6	5	4	1	-
Pupuan	17	3	0	3	2	-
Selemadeg	14	2	4	1	5	-
Selemadeg Barat	13	8	6	3	1	-
Selemadeg Timur	13	4	5	0	6	-
Tabanan	9	3	0	2	1	-
Jumlah	139	60	48	23	41	-

(Sumber : LP LPD Kab. Tabanan, 2022)

Dilihat dari Tabel diatas, dari 311 LPD di Kabupaten Tabanan, LPD dengan kategori sehat berjumlah 311. Tetapi masih cukup banyak terdapat LPD yang kurang sehat di Kabupaten Tabanan. Penurunan kesehatan LPD menggambarkan terjadinya penurunan kinerja LPD tersebut. Kinerja merujuk pada sejauh mana suatu individu, kelompok, atau organisasi mencapai tujuan, hasil, atau prestasi yang diharapkan atau diinginkan. Hal ini adalah ukuran atau evaluasi terhadap bagaimana suatu entitas atau individu melakukan dalam konteks tertentu (Rahayu, 2017).

Suwendra et.,al (2019) menyatakan bahwa ada tiga variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu: variabel orang, variabel tugas, dan variabel lingkungan. Variabel orang termasuk atribut yang dimiliki seseorang sebelum

melakukan tugas seperti konten pengetahuan, pengetahuan organisasi, kemampuan diri, kepercayaan diri, kepribadian, gaya kognitif, motivasi intrinsik, nilai-nilai budaya. Variabel tugas termasuk faktor-faktor yang bervariasi baik di dalam maupun di luar tugas, seperti kompleksitas, format presentasi, pengolahan dan respon modus siaga. Sementara itu, variabel lingkungan meliputi semua kondisi, keadaan, dan pengaruh di sekitar orang yang melakukan tugas tertentu, yaitu tekanan waktu, akuntabilitas, tujuan yang telah ditetapkan dan umpan balik.

Untuk meningkatkan kinerja LPD maka perlu dilakukan beberapa pembenahan dari segi kinerja melalui tanggung jawab sosial memiliki pengaruh terhadap perusahaan dimana perusahaan beroperasi serta mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab. Menurut Mardikanto (2018) *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat, dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perusahaan yang berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yakni memperhitungkan harapan pemangku kepentingan. Perusahaan yang menerapkan CSR dan berlandaskan kesadaran lingkungan akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan perusahaan. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naek & Tjun Tjun (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil penelitian ini justru bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Widiastuti et.,al (2021) yang menyatakan bahwa tanggung jawab social perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD yang mana penelitian tersebut dilakukan pada LPD di Kecamatan Ubud.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* menekankan keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan lingkungan. Pemilihan variabel *Tri Hita Karana* dalam penelitian menunjukkan fokus tidak hanya pada dimensi ekonomi, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Novitasari et.,al 2020). Penelitian menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh *Tri Hita Karana* terhadap kinerja LPD. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Lestari & Yudiatmaja (2022), menyatakan bahwa *Tri Hita Karana* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD. Namun, ada juga penelitian, contohnya oleh Arini et.,al (2020), yang mendapatkan hasil sebaliknya.

Hubungan antara *Tri Hita Karana* dan kinerja LPD terletak pada prinsip-prinsip yang saling terkait. Keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam sangat penting. Dalam konteks pengelolaan LPD, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip gotong royong, keadilan, dan saling

menghormati juga harus diterapkan. Kinerja LPD yang berkelanjutan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. LPD diharapkan berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian alam. *Tri Hita Karana* memberikan landasan filosofis untuk mencapai kinerja LPD yang baik dan berkelanjutan di Bali, menggabungkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (Larasati & Kustina, 2019).

Kearifan lokal berupa penerapan *Tri Hita Karana* sangat penting dalam pengelolaan LPD, namun penerapan teknologi juga tidak kalah penting dalam menunjang efisiensi kinerja LPD. Dalam menunjang kinerja lembaga keuangan yang baik maka juga diperlukan sistem informasi akuntansi yang memadai. Penerapan sistem informasi akuntansi dalam lembaga keuangan semakin berkembang pesat, tidak hanya di perbankan tetapi juga di lembaga keuangan lain seperti LPD. Sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh LPD lebih sederhana dibandingkan dengan sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh perbankan. Kinerja perusahaan sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer atau karyawan akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakni karyawan tidak akan mencuri, memanipulasi laporan keuangan, menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan investor. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu upaya untuk dapat menghindari terjadinya kecurangan serta mengifisiensi keuangan dalam LPD (Putri &

Endiana, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2022) yang menyatakan bahwa system informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan hasil yang berbeda diperoleh dalam penelitian Putri & Endiana (2020) yang mana menghasilkan bahwa system informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan teori legitimasi, organisasi berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan citra positifnya di mata masyarakat dan pemangku kepentingan dengan mengadopsi praktek-praktek sosial dan lingkungan yang diterima secara sosial. Dalam konteks CSR, LPD yang menerapkan prinsip-prinsip filosofi *Tri Hita Karana* dapat dianggap sebagai organisasi yang bertanggung jawab secara sosial dan memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. CSR yang terintegrasi dengan nilai-nilai *Tri Hita Karana*, yang melibatkan keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi, dapat memberikan legitimasi kepada LPD di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. LPD yang menerapkan CSR sesuai dengan filosofi *Tri Hita Karana* cenderung membangun citra positif sebagai lembaga keuangan yang peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. LPD dapat menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan seperti nasabah, masyarakat setempat, dan regulator, karena adopsi CSR yang sesuai dengan filosofi *Tri Hita Karana* mencerminkan tanggung jawab dan kesesuaian dengan nilai-nilai local (Kustina & Arisanti, 2022). Penjelasan mengenai Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dipahami sebagai cara

di mana pengelolaan informasi keuangan, operasional, dan non-keuangan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem akuntansi yang efisien. Implementasi SIA pada LPD dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Informasi keuangan dan operasional yang tercatat dengan baik dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait, termasuk masyarakat, anggota LPD, dan regulator. Hal ini dapat menciptakan kepercayaan dan meningkatkan kredibilitas LPD di mata pemangku kepentingan (Suryawan & Suaryana, 2018).

Adapun hal pembeda penelitian ini dan penelitian sebelumnya diantaranya pertama, peneliti dalam melakukan penentuan variable memilih faktor-faktor yang paling berpengaruh besar serta terdapat inkonsistensi penelitian yang dilakukan dengan variable-variabel tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan variable tersebut. Kedua, dalam penelitian terdahulu variable system informasi akuntansi masih jarang digunakan untuk melakukan penelitian pengaruh terhadap kinerja LPD. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti ingin membahas variabel yang mempengaruhi kinerja pada LPD di Kabupaten Tabanan dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Filosofi *Tri Hita Karana* dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja LPD pada LPD se-Kabupaten Tabanan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- (1) Adanya penurunan kinerja pada LPD di Kabupaten Tabanan yang dibuktikan dengan adanya 41 LPD bangkrut setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Tabanan bersama LPD.
- (2) Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kinerja LPD seperti penerapan CSR dalam operasional, mengeksplorasi pengaruh filosofi *Tri Hita Karana* terhadap kinerja LPD dan mengevaluasi kualitas sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh LPD di Kabupaten Tabanan.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah sangat penting guna memfokuskan penelitian pada beberapa permasalahan juga sejalan dengan variabel penelitian. Sehingga penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Filosofi *Tri Hita Karana* dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja LPD pada LPD se-Kabupaten Tabanan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas, adapun rumusan masalah:

- (1) Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja LPD pada LPD se-kabupaten Tabanan?

- (2) Apakah filosofi *Tri Hita Karana* berpengaruh terhadap kinerja LPD pada LPD se-kabupaten Tabanan?
- (3) Apakah system informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja LPD pada LPD se-kabupaten Tabanan?

1.5 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, berikut tujuan dilaksanakannya penelitian:

- (1) Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja LPD pada LPD se-kabupaten Tabanan.
- (2) Untuk mengetahui pengaruh filosofi *Tri Hita Karana* terhadap kinerja LPD pada LPD se-Kabupaten Tabanan.
- (3) Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja LPD pada LPD se-Kabupaten Tabanan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara rinci 2 (dua) manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan dalam ilmu pengetahuan dan memperluas ilmu secara teoritis dibidang akuntansi khususnya mengenai akuntansi manajemen pada kinerja LPD.

(2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas serta serta sumbangan pemikiran mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Filosofi *Tri Hita Karana* dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja LPD pada LPD se-Kabupaten Tabanan sehingga dapat membantu agar terealisasi secara merata sesuai dengan tujuan LPD.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan informasi berkaitan dengan Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Filosofi *Tri Hita Karana* dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja LPD pada LPD se-Kabupaten Tabanan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama untuk mengembangkan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.